



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2022**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023**  
**KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**16–20 DESEMBER 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a) Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b) Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 September 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 2 November 2022.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang Pertanian, dan Kelautan dan Perikanan;
2. Melihat secara langsung hasil Kegiatan SERASI (selamatkan Rawa untuk Kesejahteraan Petani) di Kabupaten Banyu Asin, Kegiatan Bulog Wilayah Sumatera Selatan, Kampung Iklim di Kota Palembang dan BKIPM (Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu) Palembang Sumatera Selatan.
3. Memberikan arahan dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas program-program Pemerintah yang terkait dengan bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan dipimpin dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

### **E. WAKTU DAN TEMPAT**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 16-20 Desember 2022.

### **F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

Lokasi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan:

1. Proyek Desa SERASI, Desa Telang Sari, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyu Asin;
2. Kampung Pro Iklim Sugiwaru, Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame;
3. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Sumatera Selatan; dan

4. Komplek Pergudangan Bulog Karya Baru, Kelurahan Karya Baru, Alang Alang Lebar, Kota Palembang.

## **II. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **A. BIDANG PERTANIAN**

#### **1. Kunjungan Kerja ke Desa SERASI, Desa Telang Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyu Asin**

- a. Desa SERASI (Selamatkan Lahan Rawa untuk Kesejahteraan Petani) merupakan kegiatan perluasan areal tanam yang direncanakan pada tahun 2018 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Pada awalnya kegiatan ini akan dibuka lahan rawa untuk kegiatan budi daya pertanian seluas 200 ribu hektar, dengan melakukan pembangunan jaringan irigasi, percontakan sawah baru, dan pembangunan jalan usaha tani. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/RC.010/10/2018 dan Kementan Nomor 59/Kpts/OT.050/M/1/2019

Tujuan dari kegiatan adalah untuk: (1) meningkatkan Indeks Pertanaman dan atau/meningkatkan produktivitas, (2) Meningkatkan Partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan Rawa. Realisasi Program SERASI untuk Sumatera Selatan seluas 159.231 hektar. Berdasarkan laporan petani pada saat kunjungan pada desa tersebut, telah terbangun luas areal lahan rawa seluas 896 hektar yang dikelola oleh 586 petani yang tergabung dalam 18 kelompok tani. Dilaporkan bahwa saat ini telah dibentuk korporasi Petani dengan Nama PT TAM yang mengelola lahan sawah rawa seluas 532 hektar.

Pada saat ini rerata produktivitas tanaman padinya adalah 7 s.d. 10 ton KKP per hektar dalam satu tahun petani dapat melakukan budi daya padi 2 kali (IP 200).

Masalah yang dihadapi oleh petani adalah:

- 1) Pupuk subsidi sulit diperoleh dan harga pupuk non subsidi sangat mahal, harga pupuk non subsidi untuk urea adalah Rp500.000,00 untuk 50 kg.
- 2) Terjadi pendangkalan pada saluran irigasi terutama pada pintu pemasukan dan pengeluaran air.

- 3) Sulit untuk mendapatkan BBM untuk kegiatan budi daya (BBM untuk Alat Mesin Pertanian). Pembelian BBM melalui jerigen untuk Alsintan tidak diayani oleh SPBU, sehingga perlu diberikan alokasi khusus untuk BBM bersubsidi untuk Pertanian.
- 4) Petani membutuhkan excavator untuk melakukan normalisasi saluran irigasi, berdasarkan penjelasan Wakil Bupati, Kabupaten Banyuasin memerlukan 300 unit excavator untuk mengolah seluruh lahan pertaniannya.
- 5) Perlu tambahan mesin *combine harvester* untuk menyikapi sulitnya tenaga kerja untuk panen dan efisiensi panen.
- 6) Petani lebih memilih subsidi produksi dibandingkan dengan subsidi pupuk, harga pupuk tidak terlalu bermasalah jika pemerintah dapat menjamin kepastian harga di tingkat petani pada saat panen.
- 7) Membentuk BUMD yang dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan pada saat panen.

Tanggapan anggota Komisi IV DPR RI terhadap permasalahan yang diajukan petani adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanan A. Rozak dari Fraksi Partai Golkar, alat mesin pertanian bantuan dari pemerintah yang dipinjam oleh petani dari Brigade ternyata bertambah, dengan demikian maka bisnis sewa alat pertanian dinilai menguntungkan dan dapat dijadikan bisnis yang dilakukan oleh Korporasi Petani. Berdasarkan Keterangan Dirjan PSP Kementan, modal untuk melakukan bisnis Alsintan dapat diperoleh melalui skema pinjaman KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan 2 miliar rupiah dan dengan uang modal atau sharing dana sendiri 10 persen dari maksimum pinjaman. Saat ini sedang dilakuakn harmoinasai regulasi terkait dengan skema taxi Alsintan dengan Kemenko agar plafon pinjaman ditambah, uang muka maksimum 10 persen dan pinjaman dikembalikan pada saat panen.
- 2) Menurut drh. Slamet dari Fraksi PKS, jika satu unit traktor roda 4 mampu untuk melakukan pengolahan lahan sawah seluas 200 ha, maka kebutuhan untuk sekitar 900 ha sawah yang berada di desa tersebut hanya memerlukan 4 unit traktor roda 4 atau TR4.

Keluhan langkanya pupuk bersubsidi memang terjadi karena jumlah pupuk subsidi kurang, dan kewenangan tersebut bukan berada di Kementerian Pertanian, melainkan di Kementerian Keuangan. Komisi IV DPR RI akan berkordinasi dengan komisi lainnya yang membidangi subsidi pupuk, agar (Kementerian Keuangan) menambah jumlah subsidainya.

Sementara itu menurut penjelasan Dirjen PSP, seharusnya kelangkaan pupuk tidak terjadi pada petani di Banyuasin. Berdasarkan datanya serapan pupuk subsidi di daerah tersebut masih rendah, artinya pupuk bersubsidi masih tersedia, akan tetapi karena banyak petani memiliki lahan lebih dari 2 hektar, maka tidak seluruh lahannya mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

- b. Program SERASI diakui oleh Pemerintah dan petani dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani padinya, akan tetapi diharapkan ada perbaikan desain dan kontruksi prasarana seperti pintu keluar masuk air dan jembatan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, yang dinilai mudah terjadi penyumbatan karena letaknya yang kurang tinggi.
- c. Untuk menutupi kebutuhan excavator, Dirjen PSP meminta agar petani dan pemerintah kabupaten berkordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mempergunakan excavator yang terdapat di Brigade SIsintan. Berdasarkan catan dari pusat di Brigade Alsintan Sumsel terdapat 65 unit excavator yang dapat dimobilisasi dan dipergunakan/dipinjamkan kepada petani untuk melakukan normalisasi saluran irigasinya. Sumatera Selatan merupakan daerah dengan penyerapan tertinggi untuk program Taxi Alsintan, yaitu sebesar Rp500 miliar untuk tahun 2022.

## **2. Kunjungan ke Gudang Bulog Karya Baru, Kelurahan Karya Baru Kota Palembang.**

- a. Pada saat kunjungan dijelaskan bahwa, secara nasional stok beras yang dikuasi adalah 448.261 ribu ton yang terdiri atas Cadangan Beras

Pemerintah (CBP) sebesar 239.340 ton dan beras komersil 208.921 ton.

- b. Dalam 1 bulan dibutuhkan 300 ribu ton untuk mengisi pasar dan stabilisasi harga beras di pasar.
- c. Realisasi pengadaan beras pada kantor wilayah kerja Bulog Sumatera Selatan hanya sebesar 21.814 ton dari target sebesar 94.000 ton atau hanya sebesar 23.21 persen dari targetnya. Seretnya pengadaan beras disebabkan harga beras di tingkat petani atau penggilingan sudah di atas HPP yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp8.200,00/kg. Saat Bulog akan melakukan pengadaan beras dari sumber dalam negeri dengan harga pembelian komersil sebesar Rp10.200,00, harga beras di tingkat petani atau di penggilingan telah mencapai harga Rp11.700,00/kg.

## **B. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

### **Kunjungan Ke Kampung Pro Iklim**

Kampung Pro Iklim yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame Kota Palembang merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian LHK dengan tujuan untuk mengurangi emisi dan pengurangan gas karbon melalui upaya pemberdayaan masyarakat di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan melalui penanaman berbagai macam tanaman pekarangan produktif, seperti tanaman palawija dan sayuran, tanaman buah-buahan bahkan tanaman hutan, budi daya peternakan dan perikanan, serta melakukan pemanfaatan limbah rumah tangga untuk pembuatan kompos. Konsep *green and clean* menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan ketua kelompok Kampung Pro Iklim, pada awalnya kegiatan Kampung Pro Iklim adalah kegiatan dari PKK yang dikembangkan dengan kegiatan kegiatan mitigasi dan adaptasi pada tingkat keluarga di pekarangan rumahnya.

Kegiatan ini selain telah membuat kualitas lingkungan mikro menjadi lebih asri dan lebih sejuk, juga menghasilkan tambahan penghasilan bagi rumah tangga melalui budi daya pertanian di pekarangan dan pembuatan kerajinan yang berasal dari limbah atau barang yang tidak dimanfaatkan.

Kampung Proklam di Kelurahan Talang Jambe telah mendapatkan penghargaan Proklam Utama dan pendampingan usaha dari Pertamina, sebagai kampung yang berhasil memperbaiki kondisi lingkungan mikronya atas dasar pemberdayaan dan keterlibatan seluruh penduduknya. Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari anggota kelompok yang tergabung dalam Desa Pro iklim, Anggota Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke kelompok Desa Pro Iklim berkesimpulan:

1. Kampung Pro Iklim merupakan kegiatan dari hatinya PKK yang diperkaya dengan pemahaman kegiatan pengelolaan lingkungan dan iklim mikro di tingkat rumah tangga, sehingga masyarakat di perkotaan mampu berkontribusi dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim pada skala rumah tangga dan kampung yang didiaminya.
2. Inisiasi Kementerian LHK dalam kegiatan tersebut dinilai masih kecil dan belum signifikan, baik dalam bentuk bantuan permodalan dan infrastrukturnya maupun kegiatan pendampingannya.
3. Kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan dapat terus ditingkatkan dalam pembangunan Kampung Pro Iklim melalui dana CSR yang dimilikinya.

### **C. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Balai Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu (BKIPM) Palembang merupakan Unit Kerja Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas utama dari unit kerja ini adalah melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ikan melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran Karantina Ikan dan sekaligus memberikan pelayanan pengawasan terhadap mutu ikan yang dilalulintaskan, baik antarprovinsi maupun antarnegara. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BKIPM Palembang telah memiliki sertifikasi ISO 9001 2015 untuk pelayanan umum dan sertifikasi ISO 17025 untuk kualitas mutu laboratorium.

Masalah utama yang dihadapi oleh BKIPM Palembang adalah:

1. Anggaran yang dikelola tidak sebanding dengan wilayah kerja dan luas wilayah yang harus diawasinya.
2. Saat ini Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Palembang masih eselon 4 sehingga ada gap dalam proses komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah yang lain.



3. Anggaran untuk kegiatan operasional laboratorium dalam melakukan pengawasan mutu produk ikan, sangat minim, terlebih bahan-bahan laboratorium harganya relatif mahal.
4. Lahan yang disediakan oleh Pemerintah provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini belum termanfaatkan karena belum tersedianya dana untuk pembangunan.

Terhadap kondisi tersebut anggota Komisi IV DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Hal yang terjadi di BKIPM Palembang juga terjadi di unit-unit kerja sejenis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Kecilnya alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berakibat banyak kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat dilaksanakan.
3. Sedang diupayakan agar anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat ditingkatkan.

### **III. KESIMPULAN**

1. Kegiatan Desa SERASI di Kabupaten Banyu Asin yang dimulai tahun 2019 mampu meningkatkan produktivitas usaha tani padi di lahan rawa dengan melakukan rekayasa pengaturan air dan menggunakan teknologi benih unggul untuk lahan rawa dan lebak.
2. Petani meneguhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi harganya mahal serta sulit untuk didapat. Petani memilih untuk mendapatkan subsidi komoditan dibandingkan dengan subsidi pupuk.
3. Untuk melakukan pemeliharaan saluran irigasi pada lahan rawa dan lebak yg mengalami pendangkalan, pemerintah akan memberikan bantuan alat excavator yang berada di Brigade Alsintan di provinsi untuk dipinjamkan pada kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang membutuhkan alat untuk revitalisasi saluran irigasinya.
4. Bisnis Taxi Alsintan dinilai memiliki prospek yang cukup baik untuk dilakukan oleh petani dalam menyediakan jasa Alsintan untuk pengelolaan lahan usaha taninya.
5. Bulog sulit untuk melakukan pengadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) karena harga padi di tingkat petani dan penggilngan maupun tingkat

petani sudah jauh di atas HPP yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan harga pembelian komersil yang lebih tinggi dari HPPnya.

6. Kampung Pro Iklim yang diinisiasi oleh Kementerian LHK dinilai rendah intervensinya dan merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat berupa kegiatan Hati PKK, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian LHK agar meningkatkan intervensinya secara signifikan sehingga kegiatan memiliki output yang lebih kaya dan berhasil guna.
7. Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian LHK untuk mengusulkan peningkatan alokasi anggarannya sehingga kegiatan-kegiatan yang strategis dapat terfasilitasi dengan baik.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 21 Desember 2022

Ketua Tim,

Ttd.

**Ir. Endro Hermono, M.B.A.**

A-111

## Foto-Foto Kegiatan







## LIPUTAN MEDIA

1. <https://sumsel.litbang.pertanian.go.id/berita-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-pada-program-serasi-kabupaten-banyuasin.html>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42511/t/Anggota+Komisi+IV+Pertanyaan+Program+Serasi+Banyuasin%2C+Sejauh+Mana+Dampaknya+Bagi+Kesejahteraan+Petani>
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42512/t/Slamet%3A+Program+Kampung+iklim+Harus+ada+Desain+Dan+Dorongan+Dari+Pemerintah>
4. <http://sumsel.litbang.pertanian.go.id/berita-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-ke-balai-karantina-ikan-dan-bulog.html>